

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Karya

Pendidikan dasar yang layak merupakan hak setiap anak Indonesia. Namun, hingga saat ini masih banyak wilayah di Indonesia yang belum merasakan kualitas pendidikan yang merata, baik dari segi fasilitas maupun kesejahteraan tenaga pendidik. Ketimpangan ini kerap terjadi di daerah-daerah pelosok yang jauh dari perhatian media dan pemangku kebijakan. Kelayakan bangunan sekolah tidak hanya dilihat dari fungsi ruang belajarnya, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas tersebut mampu menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan seluruh warga sekolah. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015), bangunan sekolah yang layak harus memenuhi prinsip Fasilitas Sekolah Aman, yang meliputi persyaratan keselamatan terhadap bencana, sanitasi yang memadai, kemudahan akses bagi anak berkebutuhan khusus, serta kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Penekanan terhadap aspek-aspek ini mencerminkan komitmen negara dalam menyediakan lingkungan belajar yang tidak hanya fungsional, tetapi juga manusiawi dan berkelanjutan bagi seluruh peserta didik.

Realita di lapangan tidak selalu sejalan dengan standar tersebut. Masih banyak sekolah dasar negeri di daerah pedalaman yang harus menjalankan proses pembelajaran dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Salah satu contohnya dapat ditemukan di SDN Lontar 2, yang terletak di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sekolah ini diketahui mengalami kekurangan ruang kelas sehingga terpaksa memanfaatkan ruang darurat yang minim fasilitas. Kondisi ini pertama kali terdeteksi melalui sebuah artikel berita dari laman *detik.com* yang memuat foto situasi sekolah tersebut tanpa laporan mendalam mengenai persoalan yang dihadapi.

Gambar 1.1 Laman Artikel Berita yang Mengangkat SDN Lontar 2



Sumber: Laman berita [detik.com](https://www.detik.com)

Berdasarkan artikel yang ditemukan, penulis menyimpulkan bahwa terdapat sebuah sekolah dasar yang hingga kini masih mengalami kekurangan ruang kelas, sehingga terpaksa memanfaatkan sebuah kelas darurat sebagai solusi sementara. Ruang kelas tambahan tersebut berada dalam kondisi yang jauh dari kata layak untuk menunjang proses pembelajaran. Fasilitas yang tersedia sangat minim, di mana ruang tersebut hanya dilengkapi dengan sebuah atap berbahan spandeks tanpa dinding maupun perlindungan lain, sehingga guru dan siswa harus tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar di bawahnya meskipun dalam kondisi yang serba terbatas dan kurang nyaman.

Gambar 1.2 Gambaran Mengenai Kelas Darurat di SDN Lontar 2



Sumber: Dokumen Pribadi

Minimnya informasi yang tersedia di media daring mengenai sekolah ini mendorong dilakukan penelusuran lebih lanjut dengan pendekatan *people trail*. Proses ini dilakukan dengan menghubungi salah satu *photojournalist* dari Antara Foto yang terlibat dalam peliputan visual terkait sekolah tersebut, guna memperoleh gambaran awal sebelum melakukan observasi langsung ke lokasi. Langkah ini penting agar data dan situasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Isu ketimpangan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari nasib guru honorer sebagai tenaga penggerak utama dalam dunia pendidikan di daerah. Berdasarkan survei kesejahteraan guru yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (IDEAS) pada tahun 2024, sebanyak 74,3% guru honorer atau kontrak di Indonesia menerima gaji di bawah Rp2 juta per bulan. Bahkan, 79,6% di antaranya diketahui memiliki utang, dan 5,2% menggunakan aplikasi pinjaman online sebagai solusi cepat atas masalah ekonomi yang dihadapi.

Gambar 1.3 Data Profil Kesejahteraan Guru Indonesia



Sumber: Laman IDEAS: Survei IDEAS: Profil Kesejahteraan Guru Indonesia

Situasi ini menunjukkan bahwa banyaknya guru honorer yang kesulitan dalam perihal finansial yang diakibatkan oleh rendahnya gaji mereka dan tanggungan yang harus mereka penuhi. Oleh karena itu, kondisi ini memaksa beberapa guru honorer tersebut untuk mencari sebuah solusi tercepat dengan

menggunakan pinjaman online yang sering kali memiliki resiko yang cukup tinggi. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam artikel yang dimuat oleh CNBC, menyatakan bahwa, "Jangan hanya melek digital dan mudah mengakses berbagai hal, tetapi tidak benar-benar memahami ilmunya secara menyeluruh. Hal ini bisa membuka peluang untuk menjadi korban produk jasa keuangan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya." (Aprilia, 2024). Dalam menanggulangi masalah tersebut, OJK mendorong untuk menerapkan sebuah edukasi keuangan kepada para guru tersebut. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan Kemendikbud, Melalui pelatihan ini, diharapkan para guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep keuangan dan bisa menyampaikannya kepada siswa. (Puspadini, 2024).

Berangkat dari realita yang telah ditemukan, program dokumenter televisi menjadi medium yang tepat untuk menghadirkan potret kehidupan para guru honorer dan kondisi sekolah yang tidak layak secara lebih menyentuh dan menyeluruh. Menurut Buckland (2015), terdapat tiga kriteria utama yang harus dipenuhi agar sebuah video dapat dikategorikan sebagai dokumenter: pertama, cerita yang diangkat harus bersifat non-fiksi dan bermakna; kedua, harus menyajikan fakta yang benar-benar terjadi; dan ketiga, proses peliputan dilakukan secara objektif tanpa rekayasa terhadap kejadian yang ditampilkan.

Program ini mengangkat tema pendidikan di daerah terpencil dengan pendekatan dokumenter partisipatif, di mana *narator* atau *host* akan berperan aktif dalam menjelajahi lokasi, berbicara langsung dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Pendekatan ini bertujuan memberikan pengalaman yang lebih personal dan emosional bagi penonton. Menurut Ayawaila (2017), dokumenter televisi merupakan salah satu dari lima format program jurnalistik yang menekankan pada kedalaman peristiwa serta penyampaian yang bersifat artistik dan human interest. Dengan pendekatan naratif dan sinematografi yang kuat, dokumenter ini tidak hanya diharapkan mampu menggugah empati penonton, tetapi juga menjadi suara yang mengingatkan pemangku kebijakan akan

pentingnya perhatian terhadap infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru honorer, yang selama ini seringkali terpinggirkan.

## **1.2 Tujuan Karya**

Karya dokumenter televisi ini memiliki beberapa tujuan utama yang akan dicapai, berikut tujuan utama dari pembuatan karya ini.

- a. Menghasilkan karya jurnalistik berupa video dokumenter yang mendalam dan informatif tentang kehidupan guru honorer di Indonesia.
- b. Mengungkap realitas sosial yang dihadapi guru honorer, termasuk tantangan, peran, dan pengorbanan mereka di tengah keterbatasan.
- c. Menyampaikan isu pendidikan kepada khalayak luas melalui media digital dan televisi sebagai upaya membangun kesadaran publik.

## **1.3 Kegunaan Karya**

Capaian yang penulis harapkan dari program dokumenter televisi, berikut kegunaan dari karya tersebut.

- a. Meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kebijakan tentang pentingnya penghargaan serta kesejahteraan guru honorer.
- b. Menyajikan informasi yang relevan untuk penelitian dan studi lebih lanjut mengenai isu tenaga pendidik di Indonesia.
- c. Memberikan sebuah bentuk inspirasi baru untuk sebuah referensi teknis dan kreatif dalam memproduksi dokumenter serupa.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A